



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 236/DJU.3/TI1.1/IX/2023

Jakarta, 26 September 2023

Lampiran : 3 (tiga) lembar

Hal : Pemantauan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat
Pertama Versi 5.3.1

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi

2. Ketua Pengadilan Negeri

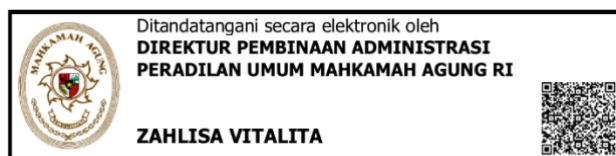
di

Seluruh Indonesia

Menunjuk surat Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI Nomor 119/S.Kel/Bua.6.01/TI1.1.2/IX/2023 tanggal 25 September 2023 hal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.3.1, dengan ini diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat memastikan pembaruan SIPP di Pengadilan Negeri masing-masing dan Ketua Pengadilan Tinggi agar memantau seluruh proses pembaruan SIPP Pengadilan Negeri di wilayah hukum masing-masing.

Pengadilan Tinggi diminta untuk melaporkan Pengadilan Negeri yang sudah dan yang belum melakukan pembaruan melalui email satgasbadilum@gmail.com paling lambat tanggal **10 Oktober 2023** dan apabila mengalami kendala dapat menghubungi Satuan Tugas SIPP Pengadilan Tinggi masing-masing yang akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas SIPP Pusat.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih



Tembusan Yth :

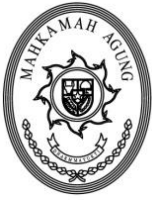
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai laporan.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. Medan Merdeka Utara NO.9-13, Jakarta 10110 – Tromol Pos No.1020
Telpon : (021) 3843348 – 3810350 – 3454546; www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 119 /Bua.6.01/TI1.1.2/IX/2023
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Hal : Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi
SIPP Tingkat Pertama versi 5.3.1

Jakarta, 25 September 2023

Kepada Yth.

1. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
2. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
3. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha

di –

Tempat

Sehubungan dengan optimalisasi dan penyempurnaan fitur-fitur pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama yang terintegrasi dengan Aplikasi e-Berpadu dan Aplikasi e-Court, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk optimalisasi proses integrasi data antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama dengan Aplikasi *e-Berpadu* dan Aplikasi *e-Court*, maka Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan wajib melakukan pembaruan Aplikasi (*update*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama ke versi 5.3.1.
2. Telah dilakukan penyempurnaan fitur-fitur pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama yang dapat dilihat dalam Halaman Lampiran Surat.
3. Sebelum melakukan pembaruan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama diwajibkan melakukan pencadangan (*backup*) Aplikasi dan Basis Data (*database*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).



4. Untuk menjaga mutu data, seluruh Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan wajib melakukan sinkronisasi data Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama ke *Server* Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap hari.
5. Masing-masing Badan Peradilan agar menginformasikan ke Seluruh Pengadilan Tingkat Banding untuk mendukung dan turut memantau pelaksanaan pembaruan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.3.1 yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Rian Andri Salam, S.Kom., M.Msi (Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi) melalui Nomor *Whatsapp* 08159156404 atau sdr. Yunawan Kurnia, S.Kom, M.T. (Kepala Sub Bagian Bimbingan Teknis) melalui Nomor *Whatsapp* 08569716311 atau sdr. Ikhwanul Dawam Sutawijaya, S.Kom., M.H. (Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi) melalui Nomor *Whatsapp* 08111739800 ataupun melalui layanan Telepon Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia (021) 3843348 ext 2863.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA-RI

Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.
NIP. 196902041996031004

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI



Berikut ini fitur-fitur yang diperbaiki/disempurnakan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama versi 5.3.1, antara lain :

1. Perbaikan pada fitur Laporan Perkara (Hakim) menampilkan data hanya pada Hakim yang aktif saja pada Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara.
2. Perbaikan pada fitur Riwayat Penahanan pada Lingkungan Peradilan Umum, Agama (Mahkamah Syar'iyah) dan Militer.
3. Perbaikan pada perekaman data putusan verzet pada Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara.
4. Perbaikan pada fitur verifikasi prodeo pada Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara.
5. Perbaikan pada fitur sinkronisasi data Aplikasi *e-Berpadu* dengan Aplikasi SIPP pada Lingkungan Peradilan Umum dan Agama (Mahkamah Syar'iyah).
6. Perbaikan pada fitur sinkronisasi data Aplikasi *e-Court* dengan Aplikasi SIPP pada Lingkungan Peradilan Umum, Agama (Mahkamah Syar'iyah) dan Tata Usaha Negara.
7. Perbaikan pada penyajian data di Halaman Tab Eksekusi pada Lingkungan Peradilan Umum dan Agama.
8. Perbaikan pada perekaman data minutasi Perkara PHI dengan nilai sengketa di bawah 150.000.000 pada Lingkungan Peradilan Umum.
9. Penambahan data referensi penyidik satuan kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Lingkungan Peradilan Umum.
10. Perbaikan pada perekaman data izin cerai pada Tab Data Umum untuk Lingkungan Peradilan Agama.
11. Perbaikan pada perekaman data alasan dispensasi kawin pada Tab Data Umum untuk Lingkungan Peradilan Agama.

